

GREEN ACCOUNTING, MENGAPA DAN BAGAIMANA?

Rohmawati Kusumaningtias

Universitas Negeri Surabaya

Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231 rkn.tias@gmail.com

Abstrak

Selama ini laporan keuangan belum mampu untuk menghadirkan informasi pelaporan aktivitas pemberdayaan lingkungan. Green accounting merupakan suatu upaya untuk menghubungkan kepentingan ekonomi perusahaan dan pelestarian lingkungan. Dengan penerapan green accounting, hasil laporan keuangan akan bersifat holistik. Artikel ini mencoba untuk mereview berbagai literatur pendukung konsep green accounting, cara pengukuran, dan pelaporan serta implementasi yang telah dilakukan oleh berbagai perusahaan.

Kata kunci: *green accounting, lingkungan, keberlanjutan, manajemen.*

Abstract

All the time financial statement has not been able to present environment empowerment activity information. Green accounting is an attempt to link the interests of the company's economic and environmental sustainability. By implementing green accounting, the financial statements will be holistic. This article attempts to review the literature supporting the concept of green accounting, measurement, reporting and implementation that have been made by companies.

Keywords: *green accounting, environment, sustainability, management.*

1) Pendahuluan

Dengan tujuan untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi, berbagai usaha dilakukan oleh perusahaan, di antaranya berproduksi menggunakan teknologi modern, pengurangan biaya, melakukan merger dan akuisisi, dan penggunaan sumber daya yang lebih murah. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk memberikan hasil maksimal bagi *stockholder*. Saat ini, perusahaan dituntut tidak hanya mengutamakan pemilik dan manajemen, tetapi juga seluruh pihak yang terkait, seperti karyawan, konsumen, serta masyarakat dan lingkungan. Hal ini karena keberadaan perusahaan tidak terlepas dari kepentingan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah dukungan lingkungan. Seringkali usaha peningkatan produktivitas dan efisiensi mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, berupa pencemaran udara, air, dan pengurangan fungsi tanah. Pelestarian lingkungan di samping bermanfaat bagi masyarakat di sekitar juga bermanfaat bagi perusahaan secara jangka panjang.

Pada era pergerakan perusahaan kearah *green company*, kalangan industri tidak hanya dituntut untuk sebatas pengolahan limbah, tetapi tuntutan masyarakat-konsumen lebih jauh lagi yaitu agar proses produksi suatu barang mulai dari pengambilan bahan baku sampai ke pembuangan suatu produk setelah dikonsumsi (digunakan) tidak merusak lingkungan (Idris, n.d). Dalam upaya pelestarian lingkungan, ilmu akuntansi berperan melalui pengungkapan sukarela dalam laporan keuangannya terkait dengan biaya lingkungan atau environmental costs. Sistem akuntansi yang di dalamnya terdapat akun-akun terkait dengan biaya lingkungan ini disebut sebagai *green accounting* atau *environmental accounting* (Aniela, 2012). Secara internal, peran dari *green accounting* dapat memberikan sebuah motivasi bagi manajer untuk mengurangi biaya lingkungan yang ditimbulkan, yang akan berpengaruh terhadap keputusan yang akan menjadi dasar eksistensi perusahaan di masa mendatang (Sahasrakirana, n.d).

Konsep green (*environmental*) accounting-akuntansi lingkungan sebenarnya sudah mulai berkembang sejak tahun 1970-an di Eropa. Akibat tekanan lembaga-lembaga bukan pemerintah dan meningkatnya kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat yang mendesak agar perusahaan-perusahaan bukan sekedar berkegiatan industri demi bisnis saja, tetapi juga menerapkan pengelolaan lingkungan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya (*environmental costs*) dan manfaat atau efek (*economic benefit*), serta menghasilkan efek perlindungan lingkungan (*environmental protection*) (Almilia dan Wijayanto, 2007). Secara singkat, *green accounting* dapat memberikan informasi mengenai sejauh mana organisasi atau perusahaan memberikan kontribusi positif maupun negatif terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungannya (Belkaoui, 2000 dalam Komar, 2004).

Istilah lain yang terkait dengan *green accounting* adalah *Sustainability Accounting* (McHugh, 2008); *Environmental Accounting Disclosure* (Lindrianasari, 2007); *Social and Environmental Reporting* (Susilo, 2008); *Social Responsibility Accounting* (Harahap, 2002); Selain itu, *green accounting* juga dikaitkan dengan *Triple Bottom Line Reporting* (Raar, 2002).

Dengan berkembangnya konsep *green accounting*, maka artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan (1) jenis dan sifat *green accounting*, (2) dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman penyajian *green accounting*, (3) alasan dan keuntungan penerapan *green accounting*, (4) perlakuan biaya lingkungan pada sistem penyajian informasi keuangan beserta kendala yang dihadapi, (5) penerapan dan peran akuntan. Penulis akan menggunakan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan menganalisa artikel-artikel terkait.

2) Green Accounting

2.1 Definisi

Akuntansi merupakan suatu ilmu yang dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungannya. Eksistensinya tidak bebas nilai terhadap

perkembangan masa. Metode-metode pembukuan juga terus berkembang mengikuti kompleksitas bisnis yang semakin tinggi. Ketika kepedulian terhadap lingkungan mulai mendapat perhatian masyarakat, akuntansi berbenah diri agar siap menginternalisasi berbagai eksternalitas. Belkoui dan Ronald (1991) dalam Idris (2012) menjelaskan bahwa budaya merupakan faktor utama yang mempengaruhi perkembangan struktur bisnis dan lingkungan sosial, yang pada akhirnya akan mempengaruhi akuntansi. Konsekuensi dari wacana akuntansi sosial dan lingkungan ini pada akhirnya memunculkan konsep *Socio Economic Environmental Accounting* (SEEC) yang sebenarnya merupakan penjelasan singkat pengertian *Triple Bottom Line*, yaitu pelaporan akuntansi ke publik tidak saja mencakup kinerja ekonomi tetapi juga kinerja lingkungan dan sosialnya.

Bell dan Lehman (1999) mendefinisikan akuntansi lingkungan sebagai :

“Green accounting is one of the contemporary concepts in accounting that support the green movement in the company or organization by recognizing, quantifying, measuring and disclosing the contribution of the environment to the business process”.

Berdasarkan definisi *green accounting* di atas maka bisa dijelaskan bahwa *green accounting* merupakan akuntansi yang di dalamnya mengidentifikasi, mengukur, menilai, dan mengungkapkan biaya-biaya terkait dengan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan (Aniela, 2012). Sedangkan aktivitas dalam *green accounting* dijelaskan oleh Cohen dan Robbins (2011:190) sebagai berikut:

“Environmental accounting collects, analyzes, assesses, and prepares reports of both environmental and financial data with a view toward reducing environmental effect and costs. This form of accounting is central to many aspects of governmental policy as well. Consequently, environmental accounting has become a key aspect of green business and responsible economic development”.

Melalui penerapan *green accounting* maka diharapkan lingkungan akan terjaga kelestariannya, karena dalam menerapkan *green accounting* maka perusahaan akan secara sukarela mamatuhi kebijakan pemerintah tempat perusahaan

tersebut menjalankan bisnisnya. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh De Beer dan Friend (2005) membuktikan bahwa pengungkapan semua biaya lingkungan, baik internal maupun eksternal, dan mengalokasikan biaya-biaya ini berdasarkan tipe biaya dan pemicu biaya dalam sebuah akuntansi lingkungan yang terstruktur akan memberikan kontribusi baik pada kinerja lingkungan (Aniela; 2012).

Beberapa teori yang mendukung penyampaian laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan adalah *legitimacy theory* dan *stakeholder theory* (Deegan, 2004: 292). *Legitimacy theory* menyatakan bahwa perusahaan akan memastikan bahwa mereka beroperasi dalam batasan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan tempat perusahaan berada. Ghazali dan Chariri (2007) menjelaskan bahwa guna melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat, perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan. Sedangkan *stakeholder theory* memperhatikan keseluruhan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. *Stakeholder* perusahaan memiliki ekspektasi masing-masing terhadap perusahaan. Manajemen akan berusaha untuk mengelola dan mencapai harapan *stakeholder* dengan penyampaian aktivitas-aktivitas lingkungan dan sosial.

2.2 Peraturan Yang Terkait Dengan *Green Accounting*

- 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini mengatur tentang kewajiban setiap orang yang berusaha atau berkegiatan untuk menjaga, mengelola, dan memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai lingkungan hidup. Akibat hukum juga telah ditentukan bagi pelanggaran yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- 2) Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam UU ini diatur kewajiban bagi setiap penanam modal berbentuk badan usaha atau perorangan untuk melaksanakan tanggung-jawab sosial perusahaan, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar. Pelanggaran

terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pembatasan, pembekuan, dan pencabutan kegiatan dan/atau fasilitas penanaman modal.

- 3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. UU ini mewajibkan bagi perseroan yang terkait dengan sumber daya alam untuk memasukkan perhitungan tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagai biaya yang dianggarkan secara patut dan wajar. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No: KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik. UU ini mengatur mengenai kewajiban laporan tahunan yang memuat Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) harus menguraikan aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 5) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 32 (Akuntansi Kehutanan) dan No. 33 (Akuntansi Pertambangan Umum). Kedua PSAK ini mengatur tentang kewajiban perusahaan dari sektor pertambangan dan pemilik Hak Pengusaha Hutan (HPH) untuk melaporkan item-item lingkungannya dalam laporan keuangan.
- 6) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penetapan Peringkat Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum. Dalam aturan ini aspek lingkungan menjadi salah satu syarat dalam pemberian kredit. Setiap perusahaan yang ingin mendapatkan kredit perbankan, harus mampu memperlihatkan kepeduliannya terhadap pengelolaan lingkungan. Standar pengukur kualitas limbah perusahaan yang dipakai adalah PROPER. Dengan menggunakan lima peringkat (hitam, merah, biru, hijau, dan emas) perusahaan akan diperingkat berdasarkan keberhasilan dalam pengelolaan limbahnya.

2.3 Jenis Akuntansi Lingkungan

Akuntansi lingkungan dari sisi pengguna dibedakan menjadi tiga jenis (Fasua, 2011):

1) Laba Akuntansi Nasional

Akuntansi lingkungan dalam konteks akuntansi pendapatan nasional mengacu pada akuntansi sumber daya alam, menyajikan informasi statistik suatu negara tentang kualitas dan nilai konsumsi sumber daya alam, yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan.

2) Akuntansi Keuangan

Akuntansi lingkungan dalam konteks akuntansi keuangan mengacu pada penyusunan laporan akuntabilitas lingkungan untuk pengguna eksternal disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum.

3) Akuntansi Manajemen

Akuntansi lingkungan dalam konteks akuntansi manajemen mengacu pada proses bisnis dengan pertimbangan penentuan biaya, keputusan investasi modal, dan evaluasi kinerja yang terkait dengan pelestarian lingkungan.

2.4 Fungsi dan Peran Akuntansi Lingkungan

Fungsi akuntansi lingkungan dibagi menjadi fungsi internal dan eksternal (Fasua, 2011):

1) Fungsi internal

Sebagai salah satu langkah dari sistem informasi lingkungan organisasi, fungsi internal memungkinkan untuk mengelola dan menganalisis biaya pelestarian lingkungan yang dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh, serta mempertimbangkan pelestarian lingkungan yang efektif dan efisien melalui pengambilan keputusan yang tepat. Hal ini sangat diperlukan keberadaan fungsi akuntansi lingkungan sebagai alat manajemen bisnis untuk digunakan oleh para manajer dan unit bisnis terkait.

2) Fungsi eksternal

Dengan mengungkapkan hasil pengukuran kegiatan pelestarian lingkungan, fungsi eksternal memungkinkan perusahaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan *stakeholder*. Diharapkan bahwa publikasi hasil akuntansi lingkungan akan berfungsi baik sebagai alat bagi organisasi untuk memenuhi

tanggung jawab mereka atas akuntabilitas kepada *stakeholder* dan secara bersamaan, sebagai sarana untuk evaluasi yang tepat dari kegiatan pelestarian lingkungan.

2.5 Sifat Dasar Akuntansi Lingkungan (Fasua, 2011):

1) Relevan

Akuntansi lingkungan harus memberikan informasi yang valid terkait dengan manfaat-biaya pelestarian yang dapat memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan *stakeholder*. Namun, pertimbangan harus diberikan kepada materialitas dan signifikansi dari relevansi. Dalam akuntansi lingkungan, materialitas ditempatkan pada aspek kuantitas dan signifikansi ditempatkan pada aspek kualitas. Dari sudut pandang materialitas, perhatian diberikan kepada dampak kuantitatif dari data yang dinyatakan dalam nilai moneter atau unit fisik. Sedangkan signifikansi berfokus pada kualitas informasi dari sudut pandang pelestarian lingkungan atau dampak masa depan yang dibawanya.

2) Handal

Akuntansi lingkungan harus menghilangkan data yang tidak akurat atau bias dan dapat memberikan bantuan dalam membangun kepercayaan dan keandalan *stakeholder*. Pengungkapan data akuntansi lingkungan harus akurat dan tepat mampu mempresentasikan manfaat-biaya serta tidak menyesatkan. Pengungkapan informasi akuntansi lingkungan seharusnya tidak hanya menjadi formalitas belaka dari sekedar memenuhi persyaratan undang-undang yang berlaku. Bila perlu, perusahaan harus menentukan metode yang tepat dan sesuai dengan pengungkapan dan secara akurat dapat menggambarkan kegiatan lingkungan yang sebenarnya sedang dilakukan. Dalam hal pengungkapan informasi tersebut tidak sepenuhnya dikomunikasikan ketika mengikuti format yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku, informasi tambahan yang diperlukan harus disediakan untuk lebih menjelaskan realitas secara lengkap. Ruang lingkup akuntansi lingkungan harus diperluas ke semua hal yang bersifat material dan signifikan untuk semua kegiatan pelestarian lingkungan.

3) Mudah dipahami

Dengan tujuan pengungkapan data akuntansi lingkungan yang mudah untuk dipahami, akuntansi lingkungan harus menghilangkan setiap kemungkinan timbulnya penilaian yang keliru tentang kegiatan perlindungan lingkungan perusahaan. Untuk memastikan bahwa informasi yang diungkapkan mudah dipahami bagi para pemangku kepentingan, kata-kata harus dibuat sesederhana mungkin. Tidak peduli seberapa kompleks kandungan informasinya, sangat perlu untuk mengungkapkan semua hal yang dianggap penting.

4) Dapat dibandingkan

Akuntansi dapat dibandingkan dari tahun ke tahun bagi sebuah perusahaan dan juga dapat dibandingkan antarperusahaan yang berbeda di sektor yang sama. Adalah penting untuk memastikan keterbandingan agar tidak menciptakan kesalahpahaman antara *stakeholder*. Namun, karena fakta bahwa pengungkapan akuntansi lingkungan bersifat independen dan berbeda-beda, perbandingan yang sederhana pun sulit dilakukan ketika terdapat perbedaan sektor bisnis dan jenis operasi. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus di mana metode yang kompleks telah dipilih dan ditetapkan dalam suatu pedoman untuk digunakan sebagai dasar untuk perbandingan, isi dari metode tersebut harus dinyatakan dengan jelas dan ketelitian harus dilakukan agar tidak menghasilkan kesalahpahaman antara *stakeholder*.

5) Dapat dibuktikan

Data akuntansi lingkungan harus diverifikasi dari sudut pandang objektif. Informasi yang dapat dibuktikan adalah hasil yang sama dapat diperoleh bila menggunakan tempat, standar, dan metode yang persis sama dengan yang digunakan oleh pihak yang menciptakan data.

5.1 Alasan Penerapan *Green Accounting*

Aktivitas-aktivitas dalam pelaksanaan *green accounting* tentunya mengeluarkan biaya. Aktivitas tersebut merupakan biaya yang harus dibebankan oleh perusahaan yang timbul bersamaan dengan penyediaan barang dan jasa kepada konsumen. Dengan beban yang telah dialokasikan diharapkan akan membentuk lingkungan yang sehat dan terjaga kelestariannya.

Kinerja lingkungan merupakan salah satu pengukuran penting dalam menunjang keberhasilan perusahaan. Beberapa alasan yang dapat mendukung pelaksanaan akuntansi lingkungan antara lain (Fasua, 2011):

- 1) Biaya lingkungan secara signifikan dapat dikurangi atau dihilangkan sebagai hasil dari keputusan bisnis, mulai dari perubahan dalam operasional dan pemeliharaan untuk diinvestasikan dalam proses yang berteknologi hijau serta untuk perancangan kembali produk yang dihasilkan.
- 2) Biaya lingkungan jika tidak mendapatkan perhatian khusus akan menjadi tidak jelas dan masuk dalam akun overhead atau bahkan akan diabaikan.
- 3) Banyak perusahaan telah menemukan bahwa biaya lingkungan dapat diimbangi dengan menghasilkan pendapatan melalui penjualan limbah sebagai suatu produk.
- 4) Pengelolaan biaya lingkungan yang lebih baik dapat menghasilkan perbaikan kinerja lingkungan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan manusia serta keberhasilan perusahaan.
- 5) Memahami biaya lingkungan dan kinerja proses dan produk dapat mendorong penetapan biaya dan harga produk lebih akurat dan dapat membantu perusahaan dalam mendesain proses produksi, barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan untuk masa depan.
- 6) Perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang didapat dari proses, barang, dan jasa yang bersifat ramah lingkungan. *Brand image* yang positif akan diberikan oleh masyarakat karena keberhasilan perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa dengan konsep ramah lingkungan (Schaltegger dan Burritt, 2000 dalam Arisandi dan Frisko, 2011). Hal ini berdampak pada segi pendapatan produk, yaitu memungkinkan perusahaan tersebut untuk menikmati diferensiasi pasar, konsumen memiliki kecenderungan untuk bersedia membayar harga yang mahal untuk produk yang berorientasi lingkungan dengan harga premium (Aniela, 2012).
- 7) Akuntansi untuk biaya lingkungan dan

kinerja lingkungan dapat mendukung perkembangan perusahaan dan operasi dari sistem manajemen lingkungan secara keseluruhan. Sistem seperti ini akan segera menjadi keharusan bagi perusahaan yang bergerak dalam perdagangan internasional karena adanya persetujuan berlakunya standar internasional ISO 14001.

- 8) Pengungkapan biaya lingkungan akan meningkatkan nilai dari pemegang saham karena kepedulian perusahaan terhadap pelestarian lingkungan. Pemegang saham perusahaan dapat lebih mudah dan cepat mendapatkan informasi dari pengungkapan tersebut sehingga dapat mempermudah pengambilan keputusan (Arisandi dan Frisko, 2011).

Selain itu, Alexopoulos et al. (2011) menunjukkan bahwa perbaikan kinerja lingkungan adalah potensi sumber keunggulan kompetitif yang mengarah ke proses yang lebih efisien, peningkatan produktivitas, biaya kepatuhan lebih rendah dan peluang pasar baru. Dengan demikian, mengintegrasikan akuntansi lingkungan ke dalam sistem informasi akuntansi perusahaan sangat penting. Memiliki sistem akuntansi lingkungan yang tepat akan memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih tepat mengenai hal-hal tersebut. Sistem ini memberikan analisis yang lebih baik atas biaya lingkungan dan dapat mengungkapkan peluang yang mungkin bisa meningkatkan pendapatan antara lain seperti daur ulang dari bahan baku, desain produk dan proses manufaktur yang lebih baik. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menekankan pentingnya akuntansi lingkungan dalam suatu organisasi dan untuk bangsa - sebaiknya bersikap 'green' - bahwa minimisasi limbah dan skema efisiensi energi dapat dan akan menghasilkan manfaat ekonomi yang besar bagi organisasi.

5.2 Biaya Perlindungan Lingkungan

Pengungkapan akuntansi lingkungan di kebanyakan negara, termasuk Indonesia masih bersifat voluntary, artinya tidak ada aturan yang mewajibkan seperti halnya pada penerbitan financial reporting (Utama, 2006 dalam Suryono dan Prastiwi, 2011).

Akuntansi keuangan konvensional menurut Idris (2012) belum dapat menyajikan informasi asset, liabilitas, pendapatan dan beban atau biaya yang terkait dengan pelestarian lingkungan. Hal ini disebabkan karena PSAK yang dijadikan sebagai pedoman belum mengatur secara jelas dan tegas kewajiban menyajikan informasi terkait dengan pelestarian lingkungan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi Tahun 2009) tentang penyajian laporan keuangan, paragraf 14 menyatakan bahwa :

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri di mana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporanyang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan”.

Bila dikaitkan dengan tanggung jawab entitas dalam upaya pelestarian lingkungan, maka PSAK tersebut belum mengakomodasinya secara totalitas. Ada dua hal penting yang perlu didiskusikan, yaitu:

- 1) Pengungkapan masih bersifat sukarela. Perusahaan terlebih dahulu akan mempertimbangkan manfaat dan biaya atas pengungkapan informasi lingkungan. Jika manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan, maka perusahaan dengan sukarela akan mengungkapkan informasi tersebut (Darwin, 2004). Hal ini berimplikasi pula pada luas dan kedalaman pengungkapan informasi lingkungan. Jika informasi tersebut bersifat „bad news“ maka perusahaan mempertimbangkan untuk tidak mengungkapkan hal tersebut.
- 2) Akuntansi lingkungan belum dianggap sebagai bagian integral dalam operasional perusahaan, sehingga beban lingkungan yang timbul tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok produksi dan atau tambahan biaya operasional tidak langsung. Padahal, pada hakekatnya biaya lingkungan adalah biaya yang muncul akibat kegiatan proses produksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan barang

atau jasa. Bila perusahaan tidak melakukan kegiatan produksi, maka biaya lingkungan ini tidak akan muncul. Keadilan ekonomi tidak ada bila terjadinya suatu penurunan fungsi lingkungan oleh suatu agen ekonomi (produsen), tetapi harus ditanggung oleh agen ekonomi lain (individu atau masyarakat) yang tidak ikut menikmati manfaat (benefit) dari suatu produk yang dihasilkan. Bila biaya lingkungan ini dibebankan pada produk yang dihasilkan, maka harga pokok produksinya akan menjadi naik dan pada gilirannya harga jualnya tentu akan naik pula (Idris, 2012). Dalam akuntansi lingkungan, terdapat beberapa komponen pembiayaan yang harus dihitung, misalnya (Handayani, 2010):

- a. Biaya operasional bisnis yang terdiri dari biaya depresiasi fasilitas lingkungan, biaya memperbaiki fasilitas lingkungan, jasa atau fee kontrak untuk menjalankan kegiatan pengelolaan lingkungan, biaya tenaga kerja untuk menjalankan operasionalisasi fasilitas pengelolaan lingkungan, serta biaya kontrak untuk pengelolaan limbah (recycling);
- b. Biaya daur ulang limbah;
- c. Biaya penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang terdiri dari biaya total untuk material, tenaga ahli, dan tenaga kerja lain untuk pengembangan material yang ramah lingkungan, produk dan fasilitas pabrik.

5.3 Keterkaitan *Green Accounting*, *Corporate Social Responsibility* dan *Sustainable Development*

Definisi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah bahwa pembangunan perlu memenuhi kebutuhan generasi saat ini sedemikian rupa tanpa harus mengurangi kemungkinan generasi masa datang memenuhi kebutuhannya. Pembangunan berkelanjutan perlu diterapkan karena kegiatan ekonomi saat ini kemungkinan besar mengurangi pemenuhan kebutuhan di masa datang dengan merusak ekosistem global (Utama, n.d). Sedangkan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan atau

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholder* yang melebihi tanggung jawab di bidang hukum (Handayani, 2010).

Implikasi pembangunan berkelanjutan terhadap CSR adalah bahwa kegiatan CSR sebaiknya diarahkan untuk mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. Malovics et al (2007) menyatakan bahwa kontribusi perusahaan melalui kegiatan CSR dapat berupa sistem dan metode produksi yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya alam (energi maupun bahan baku) serta mempengaruhi pola konsumsi sehingga tercipta konsumsi yang tidak berlebihan melainkan berkelanjutan (*sustainable consumption*), (Utama, n.d). CSR perusahaan diungkapkan dalam laporan yang disebut *Sustainability Reporting*. *Sustainability reporting* adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). *Sustainability Reporting* meliputi pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan dan pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi (ACCA dalam Anggraini, 2006). *Sustainability Reporting* terbagi menjadi tiga kategori (*tri bottom line*), yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial (Darwin, 2004). Selain itu, terdapat juga standar pelaporan dari *Global Reporting Initiative (GRI)*. GRI merupakan sebuah organisasi independen yang telah memelopori pengembangan komitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia. Indikator kinerja GRI yaitu: indikator kinerja ekonomi, indikator kinerja lingkungan hidup, indikator praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak, indikator Hak Asasi Manusia, indikator kinerja masyarakat, indikator kinerja tanggung jawab produk (Agustin, 2010). Indikator kinerja lingkungan hidup dalam *sustainability reporting* dan GRI melaporkan dampak dari produk, jasa dan proses perusahaan terhadap lingkungan, komponen dari *triple bottom line* ini dapat melaporkan pelepasan polutan ke udara dan air publik, utilisasi sumber daya alam yang dapat di

perbaharui (*renewable*) dan tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable*), dan pengelolaan sumber daya alam oleh perusahaan (Amin, 2011).

5.4 Penerapan *Green Accounting* di Indonesia

Akuntansi lingkungan mengalami kesulitan dalam pengukuran nilai *cost and benefit* eksternalitas yang muncul dari proses industri. Bukan hal yang mudah untuk mengukur kerugian yang diterima masyarakat sekitar dan lingkungan ekologis yang ditimbulkan polusi udara, limbah cair, kebocoran tabung amoniak, kebocoran tabung nuklir atau eksternalitas lain. Pelaporan baik kinerja sosial maupun kinerja lingkungan ini tidak didapati dalam laporan keuangan yang konvensional, dimana dalam laporan keuangan yang konvensional hanya dijumpai laporan kinerja ekonomi saja (Idris, 2012). Begitu pula yang terjadi di Indonesia masih sebatas anggapan sebagai suatu konsep yang rumit karena kurangnya informasi yang komprehensif bagi *stakeholder* dikhawatirkan akan menimbulkan efek dari implementasi dan pengeluaran biaya tambahan yang diakui sebagai beban yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan dalam perspektif akuntansi konvensional (Nurhayati, Brown, dan Tower, 2006 dalam Arisandi dan Frisko, 2011).

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Gray et. al (1993) dalam Burrit dan Welch (1997) bahwa pengungkapan biaya eksternalitas akan mempengaruhi pengambilan keputusan dan mempengaruhi pertimbangan *stakeholder* karena reaksi pasar telah menunjukkan hasil yang tidak berbeda terhadap aktivitas perusahaan yang melakukan (atau tidak) kepentingan sosial dan lingkungan. Sehingga pelaksanaan akuntabilitas lingkungan akan berhasil jika didukung oleh peraturan.

Menurut Solihin (2008) dalam Idris (2012), pelaksanaan CSR di Indonesia terutama berkaitan dengan pelaksanaan CSR untuk kategori *discretionary responsibilities*, yang dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda. *Pertama*, pelaksanaan CSR memang merupakan praktik bisnis secara sukarela dari inisiatif perusahaan dan bukan merupakan aktivitas yang dituntut untuk dilakukan perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. *Kedua*,

pelaksanaan CSR sesuai dengan tuntutan undang-undang (bersifat mandatory). Misalnya, BUMN memiliki kewajiban untuk menyisihkan sebagian laba yang diperoleh perusahaan untuk menunjang kegiatan sosial, dan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumberdaya alam atau berkaitan dengan sumberdaya alam, diwajibkan untuk melaksanakan CSR seperti diatur oleh UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74.

Dilihat dari sudut dasar hukum pelaksanaannya, CSR di Indonesia secara konseptual masih harus dipilah antara pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan besar dan CSR yang dilakukan oleh perusahaan kecil dan menengah. Selama ini terdapat anggapan yang keliru bahwa pelaksanaan CSR hanya diperuntukkan bagi perusahaan besar yang dapat memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan, padahal perusahaan kecil dan menengah pun bisa memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Apalagi bila perusahaan kecil dan menengah itu banyak jumlahnya, tentu dampaknya akan terakumulasi dalam jumlah yang besar dan untuk mengatasinya akan lebih sulit dibandingkan dampak yang ditimbulkan oleh satu perusahaan besar.

Bila dilihat dari pelaksanaan CSR di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan yang telah melaksanakan program CSR dan membuat laporannya belum bisa dikatakan sebagai perusahaan yang telah menerapkan akuntansi lingkungan. Hal ini disebabkan karena dalam operasional perusahaan belum memasukkan upaya pelestarian lingkungan sebagai bagian integral (Idris, 2012). Gray et al. (1993) menyimpulkan bahwa mekanisme pengungkapan yang bersifat sukarela kurang tepat. Bukti dari Deegan and Rankin (1996) menyebutkan bahwa pelaporan akuntansi lingkungan bersifat bias karena perusahaan seringkali tidak melaporkan kabar buruk (*bad news*).

5.5 Kendala Yang Dihadapi

Menurut Utama (n.d) struktur governance ikut menentukan pelaksanaan pelaporan CSR. Seperti dikemukakan oleh Cooper dan Owen (2007), dengan struktur *governance* yang saat

ini masih menekankan hanya pada kepentingan pemegang saham, maka sulit bagi *stakeholders* untuk menuntut akuntabilitas perusahaan melalui mekanisme *governance*. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena pemegang sahamlah yang berinisiatif mendirikan perusahaan, menempatkan modalnya, dan sebagai *residual claimant* adalah pihak terakhir yang berhak atas imbal hasil perusahaan setelah kewajiban kepada pihak lain dipenuhi. Sesuai dengan penelitian Suryono dan Prastiwi (2011) yang meneliti seluruh perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode tahun 2007 sampai dengan 2009, hasilnya menyatakan bahwa praktik pengungkapan CSR dipengaruhi oleh profitabilitas (ROA), ukuran perusahaan dan CG (komite audit dan dewan direksi).

Untuk mengkompensasi risiko yang ditanggung pemegang saham, maka mereka diberikan hak untuk mengawasi dan mengatur kepengurusan perusahaan. Oleh karenanya, yang diperlukan adalah menyediakan instrumen tambahan dalam struktur *governance* yang mendorong terciptakan kegiatan dan pelaporan CSR, misalnya dibentuknya komite CSR. Hingga kini belum ada aturan yang mewajibkan perusahaan untuk memiliki Komite CSR dan saat ini, sangat jarang perusahaan di Indonesia memiliki komite CSR. Keberadaan komite CSR terutama sangat penting untuk perusahaan yang berada di sektor yang potensial menimbulkan eksternalitas negatif (misalnya sektor kehutanan, pertambangan). Instrumen lainnya untuk mendukung pelaksanaan CSR adalah keberadaan jasa *assurance* atas laporan CSR oleh pihak eksternal dan independen yang berperan untuk memberi keyakinan bagi *stakeholders* bahwa laporan tersebut telah disusun sesuai dengan standar pelaporan yang ada. Namun, permasalahan lain yang muncul adalah bahwa laporan yang telah diverifikasi oleh pihak eksternalpun masih perlu dipertanyakan keandalan, konsistensi, dan keabsahannya (*robustness*). Kenyataan ini disebabkan karena hingga kini belum ada standar *assurance* terkait dengan pelaporan CSR yang diterima umum (Adams, 2002; Owen et al., 2000), sehingga jasa *assurance* umumnya menggunakan standar *assurance* keuangan, yang kurang tepat untuk laporan CSR karena

cakupannya lebih luas dan lebih bersifat kualitatif (O'Dwyer, 2001). Dengan demikian diperlukan suatu standar *assurance* yang diterima umum sehingga dapat dijadikan acuan oleh auditor eksternal dalam melakukan verifikasi terhadap laporan CSR (Utama, n.d). Agustin (2010) melakukan penelitian pada perusahaan ekstraktif yaitu perusahaan yang proses produksinya diambil langsung dari alam (*natural resources*) daftar perusahaan ekstraktif pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melakukan program lingkungan. Penelitian Agustin (2010) mendukung pemikiran sebelumnya. Hasil yang didapat bahwa tidak ada pengaruh antara kinerja lingkungan dan kinerja ekonomi perusahaan. Perusahaan yang memiliki standar kualitas mutu (ISO 9001 dan ISO 14001) serta melakukan program CSR tidak berarti dapat menunjang kinerja ekonomi yang diharapkan lebih baik. Selain itu Agustin (2010) juga mengungkapkan bahwa tidak ada pengaruh antara alokasi dana CSR dengan kinerja lingkungan dan antara kinerja ekonomi dengan alokasi dana CSR. Hal ini berarti tidak adanya standar baku pengungkapan CSR menjadikan perusahaan dapat melaporkan kinerja lingkungan sebatas pada hal yang memberikan kesan positif kepada masyarakat dan tidak terkait dengan hasil kinerja ekonomi perusahaan. Alasan ini sesuai dengan penelitian Almilia (2009), yang meneliti penggunaan website untuk pengungkapan informasi *financial and sustainability report* pada perusahaan go publik di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat beragam bentuk format laporan nonfinansial. Hal ini dikarenakan tidak terdapat standar baku, sementara standar GRI (*Global Reporting Initiative*) masih bersifat sukarela.

Sarumpaet (2005) dalam Almilia dan Wijayanto (2007), menguji hubungan antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kinerja lingkungan yang diteliti diukur dengan menggunakan rating kinerja lingkungan perusahaan atau PROPER yang disediakan oleh Bapedal/Kementerian Lingkungan Hidup RI, sedangkan kinerja keuangan diukur dengan ROA (*Return On Assets*). Penelitian tersebut membuktikan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan

perusahaan, akan tetapi ukuran perusahaan, listing di BEJ dan ISO 14001 berhubungan secara signifikan terhadap kinerja lingkungan.

Rakhiemah dan Agustia (n.d) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar (*go-public*) di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2004 hingga 2006 yang telah mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR *disclosure* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja finansial perusahaan. Selain itu, perusahaan dengan tingkat CSR *disclosure score* tertinggi hanya mengungkapkan 42 item yang tentunya masih jauh dibawah standar bila dibandingkan dengan 78 item yang seharusnya diungkapkan. Selanjutnya, Handayani (2010) meneliti pada perusahaan yang sama pada tahun 2005-2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *environmental performance* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *environmental disclosure* dan *economic performance*. Serta *environmental disclosure* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *economic performance*. Selain itu perusahaan dengan tingkat CSR *disclosure score* tertinggi hanya mengungkapkan 27 item yang tentunya masih jauh dibawah standar bila dibandingkan dengan 74 item yang seharusnya diungkapkan.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran perusahaan perusahaan publik di Indonesia saat ini baru sampai pada batas memenuhi kewajiban yang bersifat *mandatory*, dalam artian perusahaan-perusahaan tersebut baru mengimplementasikan CSR pada kategori *social obligation*, yakni implementasi CSR hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan minimal yang ditentukan oleh pemerintah dan ada kesan terpaksa (Susanto, 2003 dalam Wibisono, 2007: 52-53). Hartanti (2007) dalam Utama (n.d) melakukan penelitian menggunakan daftar yang didasarkan pada *Global Reporting Initiative* (GRI) Guideline. Pengungkapan dibagi menjadi dua yaitu pengungkapan informasi lingkungan hidup dan pengungkapan sistem manajemen lingkungan hidup. Sampel yang digunakan adalah 81 perusahaan manufaktur BUMN dan terbuka yang pernah menerima PROPER dari kementerian lingkungan hidup 14. Hartanti (2007)

menemukan bahwa rata-rata pengungkapan informasi lingkungan hidup relatif rendah, yaitu hanya 8.3 dari maksimum skor 30; demikian pula rata-rata pengungkapan sistem manajemen lingkungan hidup yang juga rendah, yaitu 2.6 dari maksimum skor 7.

Rendahnya pengungkapan informasi lingkungan dan sosial juga dikemukakan oleh Darwin (2006):

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) kompartemen Akuntansi Manajemen setiap tahun mengadakan Indonesian Sustainability Reporting Awards (ISRA), yang menemukan bahwa hanya sekitar 10% dari perusahaan publik di Indonesia mengungkapkan informasi lingkungan dan sosial dalam laporan tahunan 2004. Bahkan hanya beberapa perusahaan yang membuat laporan khusus tentang lingkungan dan sosial.

6) Kesimpulan

Dampak aktivitas perusahaan perlu dilaporkan sebagai perwujudan tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder*. Rendahnya kesadaran pelaporan dampak lingkungan disebabkan oleh beberapa kendala pelaporannya. Pentingnya akuntansi lingkungan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penerapannya. Berikut ini beberapa usaha meningkatkan pelaporan akuntansi lingkungan:

1) Menyusun standar akuntansi lingkungan.

Dalam upaya keseragaman dan memenuhi fungsi keterbandingan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) diharapkan dapat menyusun pedoman *Sustainability Reporting*.

2) Mewajibkan untuk menerapkan pedoman pelaporan yang sudah ada.

Karena keseluruhan aktivitas perusahaan akan berdampak pada masyarakat dan lingkungan dalam jangka panjang demi menjaga pembangunan yang berkelanjutan, maka *Sustainability Reporting* yang *Sustainability Reporting* bersifat *mandatory* diperlukan.

3) Memberikan penghargaan atas perusahaan yang telah menyelenggarakan *Sustainability Reporting*.

Penyelenggaraan menyelenggarakan *Indonesia Sustainability Reporting Award* (ISRA) oleh Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntansi Manajemen diharapkan akan meningkatkan reputasi perusahaan dan kemudian kesadarannya

dalam melaporkan apa saja yang telah mereka lakukan untuk memberikan nilai tambah yang berdampak pada lingkungan.

4) Melakukan audit lingkungan.

Sustainability reporting harus disertai dengan audit lingkungan guna meningkatkan kredibilitas pelaporan.

5) Mengembangkan mekanism *Good Corporate Governance* (GCG) untuk memastikan penerapan kewajiban lingkungan.

Melalui pembentukan komite CSR dalam komponen governance, diharapkan pelaksanaan green accounting dan sustainability reporting akan lebih handal dan mengalami peningkatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C. A. 2002. Factors influencing corporate social and ethical reporting: moving on from extant theories, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 15 No. 2, 223-250.
- Agustin, Triani RR. 2010. Analisis Hubungan Antara Kinerja Ekonomi dan Kinerja Lingkungan dengan Alokasi Dana CSR pada Perusahaan Ekstraktif. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Alexopoulos, Ilias; Kounetas, Kostas dan Tzelepis, Dimitris. 2011. Environmental Performance And Technical Efficiency, Is There A Link? The Case Of Greek Listed Firms. *International Journal of Productivity and Performance Management* Vol. 61 No. 1, 2012. pp. 6- 23 . Emerald Group Publishing Limited . 1741-0401. DOI 10.1108/17410401211187480
- Almilia, Luciana Spica. 2009. Analisa Kualitas Isi Financial And Sustainability Reporting Pada Website Perusahaan Go Publik Di Indonesia. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009 (SNATI 2009) ISSN: 1907-5022. Yogyakarta, 20 Juni 2009.
- Almilia, Luciana Spica dan Wijayanto, Dwi. 2007. Pengaruh Environmental Performance Dan Environmental Disclosure Terhadap Economic Performance. *Proceedings The 1st Accounting Conference*. Depok, 7 – 9 November 2007.
- Anggraini, Yunita. 2008. Hubungan Antara Environmental Performance, Environmental Disclosure dan Return Saham. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Aniela, Yoshi. 2012. Peran Akuntansi Lingkungan Dalam Meningkatkan Kinerja Lingkungan Dan Kinerja Keuangan Perusahaan. *Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi – Vol 1, No. 1, Januari 2012*.
- Arisandi, Desi dan Frisko, Dianne. 2011. Green Rush in Accounting Field of Indonesia From Different Perspectives. *Papers.ssrn*
- Armin, Muhammad Isra. 2011. Pengaruh Penghargaan Indonesia Sustainability Reporting Awards (ISRA) Terhadap Abnormal Return dan Volume Perdagangan Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Peraih Penghargaan Isra 2009-2010). Skripsi. Universitas Hassanudin.
- Bell, F dan Lehman, G. 1999. Recent Trends in Environment Accounting: How Green Are Your Account. *Accounting Forum* .
- Burrit, Roger L dan Welch, Stephen. 1997. *Accountability for environmental performance of the Australian Commonwealth public sector. Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 10 No. 4, 1997, pp. 532-561.
© MCB University Press, 0951-3574
- Carolina Verani, Martusa Riki, dan Meythi. n.d. Akuntansi Lingkungan: Solusi untuk Problematika Penerapan Corporate Social Responsibility di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”*.
- Cohen, N., dan P. Robbins. 2011. *Green Business: An A-to-Z Guide*. Thousand Oaks. California: SAGE Publications Inc.
- Cooper, S. M., dan D. L. Owen, 2007, Corporate social reporting and stakeholder accountability: The missing link, *Accounting, Organization, and Society*, 32, 649- 667.
- Darwin A. 2004. Penerapan Sustainability Re-

- porting di Indonesia. Konvensi Nasional Akuntansi V, Program Profesi Lanjutan, Yogyakarta, 13-15 Desember 2004.
- Darwin, A., 2006, Akuntabilitas, kebutuhan, pelaporan dan pengungkapan CSR bagi perusahaan di Indonesia, *Economics Business Accounting Review*, Departemen Akuntansi FEUI, Edisi III, 83-95.
- De Beer, P., dan F. Friend. 2005. Environmental Accounting: A Management Tool for Enhancing Corporate Environmental and Economic Performance, *Ecological Economics* 58 (2006) 548– 560.
- Deegan, Craig. 2004. Financial Accounting Theory. Australia: McGraw-Hill
- Deegan, C. and Rankin, M. 1996. Do Australian companies report environmental news objectively?. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 9 No. 2, pp. 50-67.
- Fasua, Kayode Olushola. 2011. Environmental Accounting: Concept and Principles. Certified National Accountant Volume 19 Number 2 April - June, 2011.
- Ghozali dan Chariri. 2007. Teori Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Gray, R., Kouhy, R. and Lavers S. (1995). Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of the Literature and a Longitudinal Study of UK Disclosure. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 8, 47-77.
- Handayani, Ari Retno. 2010. Pengaruh Environmental Performance Terhadap Environmental Disclosure Dan Economic Performance Serta Environmental Disclosure Terhadap Economic Performance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Harahap, S.S. 2002. Teori Akuntansi. Edisi revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Idris. 2012. Akuntansi Lingkungan Sebagai Instrumen Pengungkapan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Lingkungan Di Era Green Market. Universitas Negeri [Padang/
idris_unp@yahoo.co.id](mailto:Padang/idris_unp@yahoo.co.id)
- Komar, Seful. 2004. Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial (Social Responsibility Accounting) dan Korelasinya dengan Akuntansi Islam. *Media Akuntansi*. Edisi 42/Tahun XI, hal. 54-58
- Lindrianasari. 2007. Hubungan antara Kinerja Lingkungan dan Kualitas Pengungkapan Lingkungan dengan Kinerja Ekonomi Perusahaan di Indonesia. *JAAI*. Vol 11. No2.
- McHugh, J. 2008. Accountants have key role in sustainability. *Public Finance*; Dec 14, Academic Research Library.
- Nurhayati, R., Brown, A., & Tower, G. 2006. Natural Environment Disclosures of Indonesia Listed Companies. AFAANZ Conference. Wellington.
- O'Dwyer, B. 2001. The legitimacy of accountants' participation in social and ethical accounting, auditing, and reporting, *Business Ethics: A European Review*, Vol 10 No. 1, 27-39.
- Owen, D. L., T. A. Swift, C. Humphrey, dan M. Bowerman. 2000. The new social audits: accountability, management capture or the agenda of social champions?, *European Accounting Review*, Vol. 9 No. 1, 81-98.
- Raar, J. 2002 . Environmental initiatives: Towards triple-bottom line reporting. *Corporate Communications*. Bradford: Vol.7, Iss. 3; pg. 169, 15 pgs.
- Rakhiemah, Adilla Noor dan Agustia, Dian. n.d. Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure Dan Kinerja Finansial Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.
- Susi Sarumpaet . 2005 . The Relationship Between Environmental Performance and Financial Performance of Indonesian Companies., *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, vol. 7, no.2, Nopember hal. 89-98, Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi –Universitas Kristen Petra.
- Sahasrakirana, Galuh Widya. n.d. Evaluasi Peran Akuntansi Lingkungan Untuk Mendukung

- Keputusan Manajemen Lingkungan Dalam Mencapai Sustainability Perusahaan (PT Sahabat Mewah Dan Makmur). Skripsi Universitas Bina Nusantara.
- Schaltegger, S. dan Burritt, R. 2000. *Contemporary Environmental Accounting*. Greenleaf Publishing Limited.
- Solihin, Ismail. 2008. *Corporate Social Responsibility, Fom chairty to sustainability*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta
- Suryono, Hari dan Prastiwi, Andri. 2011. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance(CG) Terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report (SR) (Studi Pada Perusahaan – Perusahaan Yang Listed (Go-Public) DI Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2007-2009). Simposium Nasional Akuntansi 14. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Susilo, Joko. 2008. *Green Accounting Di Daerah Istimewa Yogyakarta: Studi Kasus Antara Kabupaten Sleman Dan Kabupaten Bantul*. JAAI Volume 12 No. 2, Desember 2008: 149-165.
- Utama, 2006. *Praktek Pengungkapan Sosial pada Laporan Tahunan Perusahaan di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi 3, 2000.
- Utama, Sidharta. n.d. *Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia*. Pidato pengukuhan guru besar Universitas Indonesia.
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing.

BIOGRAFI PENULIS

Penulis adalah dosen di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia. Beliau mendapatkan gelar Magister Sains Akuntansi, dari Universitas Brawijaya, Malang, pada tahun 2008. Fokus pengajaran dan penelitiannya adalah pada akuntansi syariah dan akuntansi manajemen (CSR dan GCG). Untuk informasi lebih lanjut, beliau dapat dihubungi melalui rkn.tias@gmail.com.